



**PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

AREA 3

**PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM APARATUR**

iii. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUM APARATUR

ANGGOTA TIM KERJA AREA 3



Sigit Purnomo

Penanggung Jawab



Nor Rosyid Ardani

Ketua



Mundiri

Ketua



Maria Ulfah Kusumaastuti

Sekretaris



Yogi Djatnika

Sekretaris



Mazmur Alexander Manik

Anggota



Jeklin Indriani Br Purba

Anggota



Ishak Purnama

Anggota

DAFTAR ISI

1. Laporan Pelatihan Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi bagi PSE Publik 2023
2. Laporan Pelatihan Modelling Kerangka Kerja Arsitektur 2023
3. Nodin Pelatihan Pentest Basic & Ethical Hacking 2023
4. ST Pelatihan Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi bagi PSE Publik 2023
5. ST Pelatihan Modelling Modelling Kerangka Kerja Arsitektur SPBE 2023
6. ST Pelatihan Vmix 2023
7. Undangan Pelatihan Data Management Platform 2023
8. Undangan Pelatihan Modelling Kerangka Kerja Arsitektur SPBE 2023



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 8666//TI.00/09/2023

Kepada : Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Dari : Pranata Komputer Ahli Pertama
Perihal : **Laporan Pelatihan SMKI SPBE**
Tanggal : 25 September 2023

Menindaklanjuti Surat Tugas Nomor 706/ST.SPD/2000/09/2023 perihal Pelatihan Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi bagi PSE Publik T.A. 2023 yang ditugaskan kepada Debby, berikut kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 22 September 2023 di Pusbang BSSN dengan hasil kesimpulan pelatihan tersebut sebagai berikut:

1. Dalam Penyusunan Kebijakan SMKI SPBE diperlukan Risk Register dan SOP untuk memudahkan dalam penyusunannya.
2. Syarat Penyusunan Kebijakan SMKI SPBE berdasarkan Katategori Sistem Elektronik:
 - Kategori Strategis
Wajib ISO 27001, SMKI SPBE yang ditetapkan oleh BSSN, dan Standar keamanan lain terkait dengan keamanan siber yang ditetapkan oleh K/L.
 - Kategori Tinggi
Boleh ISO 27001 dan/atau SMKI SPBE yang ditetapkan oleh BSSN dan Standar keamanan lain terkait dengan keamanan siber yang ditetapkan oleh K/L.
 - Kategori Rendah
Boleh ISO 27001 dan/atau SMKI SPBE yang ditetapkan oleh BSSN.
3. Draf Kebijakan SMKI SPBE, Risk Register, dan SOP (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Pranata Komputer Ahli Pertama,
Debby

Tembusan Yth.:

1. Kepala Biro SDMO;
2. Inspektur.



Digital Signature
mk-359759505230925100054





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

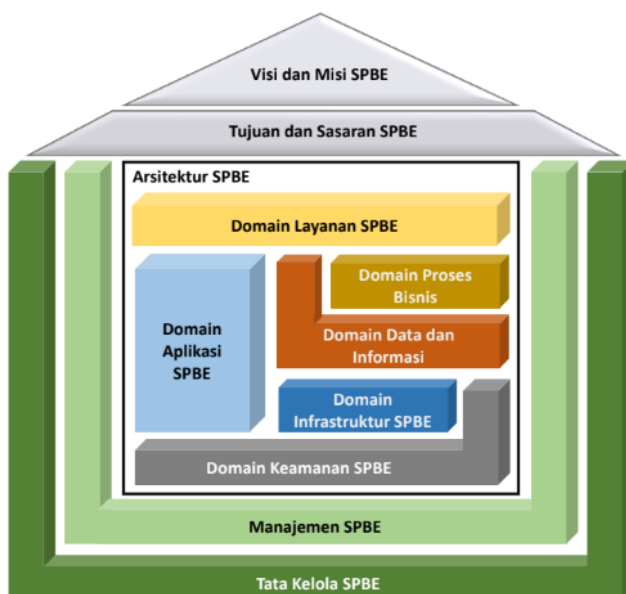
NOTA DINAS

Nomor: 5629/2200/RB.00/10/2023

Kepada Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Perihal : Laporan Kegiatan FGD Pelatihan Modelling Kerangka Kerja Arsitektur SPBE pada Instansi Pusat
Tanggal : 24 Oktober 2023

Menindaklanjuti surat Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nomor B/1325/KT.03/2023 tanggal 9 Oktober 2023 Perihal Undangan FGD Pelatihan Modelling Kerangka Kerja Arsitektur SPBE pada Instansi Pusat, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

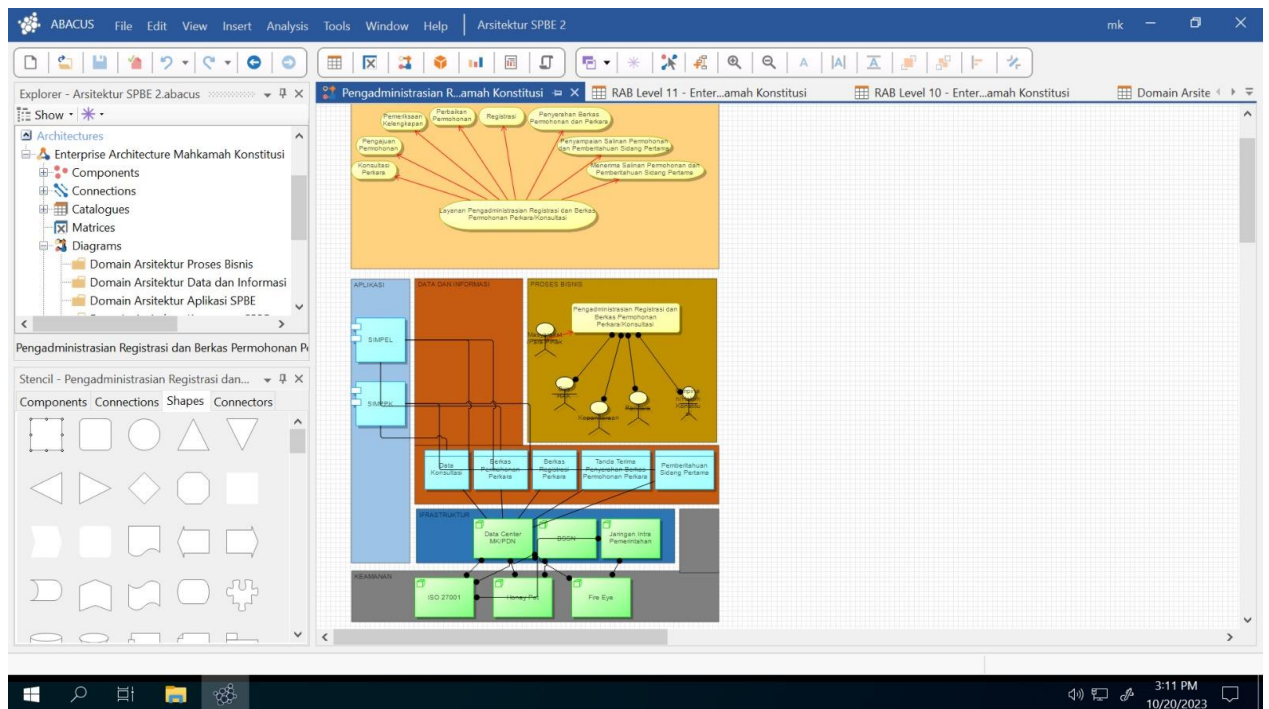
1. Kegiatan FGD diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 Pukul 09.00 WIB – 15.00 WIB.
2. Materi FGD disampaikan oleh narasumber dari SOLTEK (Solusi Teknologi Transformasi) sebagai berikut:
 - Fariz BM (No Hp 081391720769);
 - Fadhil (No Hp 081289518069).
3. Tujuan kegiatan FGD adalah peserta mampu menyusun kerangka arsitektur SPBE dalam aplikasi Sistem Informasi Arsitektur (SIA).
4. Arsitektur SPBE dalam kerangka kerja SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi.
5. Manfaat menyusun kerangka kerja adalah sebagai panduan integrasi proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE.
6. Arsitektur SPBE dalam kerangka kerja SPBE disusun untuk jangka waktu lima (5) tahun terdiri dari arsitektur SPBE nasional, arsitektur SPBE instansi pusat, arsitektur SPBE pemerintah daerah.
7. Kerangka kerja arsitektur SPBE



8. Satu kerangka kerja arsitektur SPBE hanya untuk 1 layanan utama dan beberapa layanan pendukung.
9. Kerangka Arsitektur SPBE disusun kedalam aplikasi Abacus (Sistem Informasi Arsitektur/SIA).



10. Tidak ada indikator tertentu untuk menentukan layanan utama ataupun pendukung, ditentukan sendiri oleh instansi /organisasi mana yang menjadi layanan utama.
11. Jadi tentukan terlebih dahulu mana layanan utama dan mana layanan pendukung
12. Tata cara penyusunan kerangka kerja arsitektur SPBE sebagaimana paparan narasumber terlampir.
13. Setelah pertemuan ini akan ada acara pertemuan selanjutnya terkait Bisnis Proses Modelling Notation (BPMN).
14. Dalam kegiatan tersebut, kami telah mencoba menyusun kerangka kerja layanan Pengadministrasian Registrasi dan Berkas Permohonan Perkara/Konsultasi sebagai berikut:



Demikian penyampaian kami. Atas perhatian dan arahan lebih lanjut kami sampaikan terimakasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia
dan Organisasi,
Sri Handayani



Dokumentasi Rapat



Kehadiran

<p>Acara Pelatihan Modelling Kerangka Kerja Arsitektur SPBE pada Instansi Pusat</p>		
<p>Waktu Selasa, 17 Oktober 2023 09:00 WIB</p>	<p>Lokasi Hotel RA Suites Simatupang RT.2/RW.9, West Cilandak, Cilandak, South Jakarta City, Jakarta 12430</p>	
<p>Peserta Sri Haryanti 197804282007122001 Pranata Komputer Ahli Muda Instansi Peserta Mahkamah Konstitusi</p>		<p>Scan Here</p>
<p>35767468</p>		

<p>Acara Pelatihan Modelling Kerangka Kerja Arsitektur SPBE pada Instansi Pusat</p>		
<p>Waktu Selasa, 17 Oktober 2023 09:00 WIB</p>	<p>Lokasi Hotel RA Suites Simatupang RT.2/RW.9, West Cilandak, Cilandak, South Jakarta City, Jakarta 12430</p>	
<p>Peserta Debby Yelviona 198505132009122003 Analis sdm aparatur ahli muda Instansi Peserta Mahkamah Konstitusi</p>		<p>Scan Here</p>
<p>35724406</p>		





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS Nomor **6673//KU.02.00/07/2023**

Kepada : Pejabat Pembuat Komitmen VII
Dari : Pengelola Situs Web
Perihal : Pelatihan Pentest Basic & Ethical Hacking
Area RB : Penguatan Akuntabilitas
Tanggal : 30 Juli 2023

Dengan hormat, guna mendukung kegiatan Unit Kerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka menghadapi tantangan keamanan cyber, kiranya perlu untuk menambah wawasan 2 pegawai (Tarnoto dan Indra Pandu) dengan mengikuti Kelas Basic Pentest & Ethical Hacking di taleenta.id. Adapun pelatihan dalam kelas tersebut akan dilaksanakan dalam rentang waktu 31 Juli – 12 Agustus 2023 (6 pertemuan) Via Zoom & Youtube Eksklusif dengan biaya sebesar Rp. 275.000/orang yang akan dibebankan pada mata anggaran TA 2023 Belanja Barang Non Operational Lainnya 077.01.BJ.3372.BCE.001.005.F.521219.

Mohon kiranya Bapak dapat menyetujui pengadaan tersebut.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Pengelola Situs Web,
Indra Pandu WP



Digital Signature
mk-1219569649230730090522

Lampiran Nota Dinas

Nomor : 6673//KU.02.00/07/2023

Tanggal : 30 Juli 2023

Kuota Terbatas!

Pendaftaran ditutup 31 Juli

ELITE	SUPREME	PRIVATE/CORPORATE
Rp 400 rb	Rp 500 rb	Mulai dari
Rp 245 rb	Rp 275 rb	Rp 5.5 jt
Daftar Sekarang	Daftar Sekarang	Hubungi CS
<ul style="list-style-type: none">✓ Kelas Zoom Eksklusif✓ Rekaman Kelas✓ Modul✓ Grup Mentoring	<ul style="list-style-type: none">✓ Kelas Zoom Eksklusif✓ Rekaman Kelas✓ Modul✓ Grup Mentoring★ E-Certificate	<ul style="list-style-type: none">★ Kelas Zoom Privat✓ Rekaman Kelas✓ Modul★ Grup Privat Mentoring★ E-Certificate★ Jadwal Fleksibel★ Materi sesuai kebutuhan





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS Nomor 706/ST.SPD/2000/09/2023

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai dalam penyusunan kebijakan manajemen keamanan informasi bagi PSE, perlu mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan penyusunan kebijakan manajemen keamanan informasi bagi PSE;
- b. bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Tugas kepada pegawai yang namanya ditunjuk dalam surat tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Surat BSSN Nomor 4606/BSSN/P3/DL.07.02/08/2023 tentang Penawaran Pelatihan Penyusunan Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi bagi PSE Publik TA 2023.

Memberi Tugas:

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Debby NIP. 199312192023212027	Pranata Komputer Ahli Pertama

- Untuk : 1. Melaksanakan tugas mengikuti Pelatihan Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi bagi PSE Publik T.A. 2023 pada:
Tanggal : 18 s.d. 22 September 2023
Tempat : Pusat Pengembangan SDM BSSN Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Kel. Bojong Sari Lama, Kec. Bojong Sari, Depo.
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan kepada Pimpinan;
3. Kepada yang bersangkutan untuk diberikan hak keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 07 September 2023
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.:

1. Kepala Pusat TIK;
2. Kepala Biro SDMO.



Digital Signature
mk-359759505230907091807



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS Nomor: 801/ST.SPD/2000/10/2023

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadiri undangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menjadi peserta kegiatan FGD Pelatihan Modelling Kerangka Kerja Arsitektur SPBE pada Instansi Pusat, berdasarkan surat undangan nomor. B/1325/KT.03/2023 tanggal 09 Oktober 2023, perlu menugaskan pegawai untuk kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Tugas kepada peserta yang namanya ditunjuk dalam surat tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas:

Kepada :	No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
	1.	Sri Haryanti 197804282007122001	Penata Tingkat I / III d	Pranata Komputer Muda
	2.	Debby Yelviona 198505132009122003	Penata/III c	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda

- Untuk :
- Melaksanakan tugas sebagai peserta kegiatan kegiatan FGD Pelatihan Modelling Kerangka Kerja Arsitektur SPBE pada Instansi Pusat pada:
hari, tanggal : Jum'at, 20 Oktober 2023
waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
tempat : Hotel RA Suites Simatupang, RT.2/RW.9, Cilandak,
Jakarta Selatan 12430.
 - Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dengan penuh tanggung jawab.
 - Melaporkan hasilnya kepada pimpinan.

Jakarta, 16 Oktober 2023
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.:

- Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk-1319072708231016020709



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS NOMOR 749/2000/11/2023

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dasar dalam penggunaan Perangkat Lunak VMix dalam konteks produksi video dan streaming;
- b. bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Tugas kepada Pegawai untuk mengikuti Pelatihan Pengenalan Perangkat Lunak VMix.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Memberi Tugas:

- Kepada : *Daftar Nama Terlampir*
- Untuk : 1. Mengikuti Pelatihan Pengenalan Perangkat Lunak VMix, pada :
Hari/Tanggal : 29 November s.d. 1 Desember 2023
Tempat : Kantor Sciencom
The H Tower 16th Floor, Jl. H.R Rasuna Said Kav. 20
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
3. Melaporkan hasilnya kepada pimpinan.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 20 November 2023
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Lampiran Surat Tugas

Nomor : 749/2000/11/2023

Tanggal : 20 November 2023

Daftar Peserta Pelatihan Pengenalan Perangkat Lunak VMix

NO	NAMA/NIP	JABATAN	UNIT KERJA
1.	Widy Hastowahyudi	Pranata Komputer Ahli Muda	Pusat TIK
2.	Nahar slamet	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Pusat TIK
3.	Taufik Gunanda	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pusat TIK
4.	M. Ridho Ihsan	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pusat TIK
5.	Indra Pandu Wibowo Purwanto	Pengelola Situs Web	Pusat TIK





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2692/KP.02.00/12/2023
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : **Pelatihan *Data Management Platform***

Jakarta, 15 Desember 2023

Yth. Daftar Undangan Terlampir
di Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa pengadaan pembangunan *Data Management Platform* dan *API Monitoring System* Pusat TIK akan melakukan pelatihan *Data Management Platform* didukung *Big Data Integration & Engineering tools*, dan *Big Data Analytics & Data Science tools*. Terkait hal tersebut kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/I untuk mengikuti pelatihan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin s.d. Kamis, 18 s.d. 21 Desember 2023
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Delegasi Lantai 4 Gedung 1 MK
Agenda : Terlampir

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi,

Sigit Purnomo

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
3. Kepala Biro Umum;
4. Inspektur.



Digital Signature
mk1778597123231215091839

Lampiran Surat Undangan
Nomor : 2692/KP.02.00/12/2023
Tanggal : 15 Desember 2023

DAFTAR UNDANGAN PELATIHAN

NO	NAMA	JADWAL PELATIHAN
1.	Sigit Purnomo	18 – 19 Desember 2023
2.	Riska Aprian	18 – 19 Desember 2023
3.	Taufik Gunanda	18 – 19 Desember 2023
4.	Jeklin Indriani Purba	18 – 19 Desember 2023
5.	Sri Haryanti	18 – 19 Desember 2023
6.	Ishak Purnama	18 – 19 Desember 2023
7.	Hafidz Ikhsan Baihaki	18 – 19 Desember 2023
8.	Debby	18 – 19 Desember 2023
9.	Rudi Kurniawan	18 – 19 Desember 2023
10.	Nahar Slamet	18 – 19 Desember 2023
11.	Jefriyanto	18 dan 21 Desember 2023
12.	Widy Hastowahyudi	18 dan 21 Desember 2023
13.	Mazmur Alexander Manik	18 dan 21 Desember 2023
14.	Lesmana Ramadon	18 dan 21 Desember 2023
15.	Nur Rakhman	19 – 20 Desember 2023
16.	Tarnoto	19 – 20 Desember 2023
17.	Indra Pandu Wibowo Purwanto	19 – 20 Desember 2023
18.	Muhamad Aussie	19 – 20 Desember 2023
19.	Muhammad Ridho Ihsan	20 – 21 Desember 2023
20.	Agung Wisnu Laksono	20 – 21 Desember 2023
21.	Nanda Adytiansyah	20 – 21 Desember 2023
22.	Aria Yudha	20 – 21 Desember 2023
23.	Bobi Arianto	20 – 21 Desember 2023
24.	Adam Ghuzale Ramadhan	20 – 21 Desember 2023
25.	Rachman Karim	20 – 21 Desember 2023
26.	Jamaludin Salam	20 – 21 Desember 2023
27.	Muhammad Rihan Athallah	20 – 21 Desember 2023
28.	Muhammad Radhi Zhafari	20 – 21 Desember 2023



Peserta Eksternal

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sigit Prasetyo	Trainer PT. 247
2.	Faisal arif	Trainer PT. 247
3.	Frans Silitonga	Tim PT. 247
4.	Ryanmyzard	Tim PT. 247
5.	Mia Fajar	Sales PT. 247
6.	Dessy	Sales PT. 247



Lampiran Surat Undangan
Nomor : 2692/KP.02.00/12/2023
Tanggal : 15 Desember 2023

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

HARI	WAKTU (WIB)	MATERI	PEMATERI
Pertama 18 & 20 Desember 2023	09.00 – 12.00	Apache Ambari dan HDFS	PT. 247
	12.00 – 13.30	ISHOMA	PT. 247
	13.30 – 16.00	Apache Hive dan Spark	PT. 247
Kedua 19 & 21 Desember 2023	09.00 – 12.00	HGrid247 Data Engineering	PT. 247
	12.00 – 13.30	ISHOMA	PT. 247
	13.30 – 16.00	HGrid247 Analytics	PT. 247



Nomor : B/1325/KT.03/2023

09 Oktober 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 2 (Dua) Berkas

Hal : **Undangan FGD Pelatihan Modelling Kerangka Kerja Arsitektur SPBE pada Instansi Pusat**

Yth.

Daftar Penerima Terlampir

di

Tempat

Dalam rangka mendukung penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional, khususnya untuk mencapai Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE serta tindaklanjut penyusunan Arsitektur SPBE Instansi Pusat, untuk itu Kementerian PANRB dan PT. Solusi Teknologi akan melakukan pendampingan teknis SPBE, yang difokuskan kepada kegiatan Pelatihan Modelling Kerangka Kerja Arsitektur SPBE di lingkup Instansi Pusat, yang dimaksud akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa - Jum'at, 17 - 20 Oktober 2023

Waktu : 08.30 WIB - selesai

Tempat : Hotel RA Suites Simatupang, RT.2/RW.9, West Cilandak, Cilandak, South Jakarta City, Jakarta 12430

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menugaskan **1 (satu) orang** Pejabat/Pegawai dari unit kerja yang menangani TIK dan **1 (satu) orang** Pejabat/Pegawai dari unit kerja yang menangani Organisasi dan Tata Laksana untuk dapat mengikuti acara sesuai dengan pembagian jadwal pelaksanaan terlampir.

Untuk informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui narahubung dengan nomor telepon/whatsapp 085719443845 (Sdri. Desti). Bagi peserta yang ditugaskan, wajib untuk mengisi konfirmasi pada tautan berikut <https://bit.ly/KonfirmasiKerangkaKerjaArsi> paling lambat 1 (Satu) hari sebelum hari pelaksanaan. Adapun sebagai informasi Kementerian PANRB hanya menanggung paket meeting, sedangkan untuk biaya transportasi, akomodasi dan uang saku ditanggung oleh masing-masing peserta.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan Kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

CAHYONO TRI BIROWO

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tembusan

Cefat Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230918EGIE

Lampiran I

Nomor : B/1325/KT.03/2023

Tanggal : 09 Oktober 2023

Daftar Penerima Undangan

Kepada Yth:

Selasa, 17 Oktober 2023, Hotel RA Suites Simatupang

No	Nama Instansi
1	Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3	Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4	Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5	Kepala Biro Sistem Informasi dan Pengolahan Data, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6	Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7	Kepala Biro Komunikasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
8	Kepala Biro Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
9	Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
10	Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan SDM Aparatur, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11	Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
12	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
13	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14	Kepala Biro Data dan Informasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15	Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
16	Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
17	Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan;
18	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Perdagangan;
19	Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
20	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
21	Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
22	Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
23	Kepala Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
24	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

25	Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Perindustrian;
26	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Perindustrian;
27	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
28	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
29	Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Kementerian Keuangan;
30	Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Kementerian Keuangan;
31	Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
32	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
33	Kepala Biro Informasi, Data, dan Teknologi, Kementerian Sekretariat Negara;
34	Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, Hukum, dan Reformasi, Kementerian Sekretariat Negara;
35	Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Informasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
36	Kepala Biro Umum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
37	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
38	Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
39	Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan;
40	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kesehatan;
41	Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
42	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
43	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
44	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kementerian Perhubungan;
45	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial;
46	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Sosial;
47	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi, Badan Siber dan Sandi Negara;
48	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Badan Siber dan Sandi Negara.

Kepada Yth:

Rabu, 18 Oktober 2023, Hotel RA Suites Simatupang

No	Nama Instansi
1	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, Kementerian Agama;
2	Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian Agama;
3	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kemeterian Pemuda dan Olahraga;
4	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Kemeterian Pemuda dan Olahraga;
5	Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Pertahanan;
6	Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian Pertahanan;
7	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8	Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9	Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Pertanian;
10	Sekretaris Direktur Jenderal, Kementerian Pertanian;
11	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
12	Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
13	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kementerian dan Perwakilan, Kementerian Luar Negeri;
14	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Luar Negeri;
15	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan;
16	Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Aparatur, Kementerian Ketenagakerjaan;
17	Kepala Pusat Data dan Informasi, Tata Ruang dan LPPB, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
18	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
19	Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
20	Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
21	Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
22	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
23	Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sistem Informasi dan Umum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25	Direktur Sistem Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik;
26	Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Badan Pusat Statistik;
27	Kepala Pusat Data dan Informasi, Arsip Nasional Republik Indonesia;
28	Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum, Arsip Nasional Republik Indonesia;
29	Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial;
30	Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum, Badan Informasi Geospasial;

31	Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
32	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
33	Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
34	Kepala Biro Hukum dan Komunikasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
35	Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
36	Kepala Biro Hukum dan Perencanaan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
37	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan, Badan Standarisasi Nasional;
38	Kepala Pusat Data dan Informasi, Badan Standarisasi Nasional;
39	Kepala Biro Organisasi, SDM dan Hukum, Badan Pangan Nasional;
40	Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan, Badan Pangan Nasional;
41	Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
42	Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
43	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
44	Kepala Pusat Data dan Informasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
45	Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
46	Kepala Pusat Database, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
47	Kepala Pusat Penelitian, Data dan Informasi, Badan Narkotika Nasional;
48	Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Badan Narkotika Nasional;
49	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Badan Kepegawaian Negara;
50	Direktur Infrastruktur Teknologi Informasi, Badan Kepegawaian Negara;

Kepada Yth:

Kamis, 19 Oktober 2023, Hotel RA Suites Simatupang

No	Nama Instansi
1	Direktur Data dan Informasi, Badan Keamanan Laut;
2	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Badan Keamanan Laut;
3	Direktur Sistem Komunikasi, Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan;
4	Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan;
5	Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Lembaga Administrasi Negara;
6	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Lembaga Administrasi Negara;
7	Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pengendalian Terorisme;
8	Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
9	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
10	Kepala Pusat Data dan Informasi, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
11	Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal, Dewan Ketahanan Nasional;
12	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan, Dewan Ketahanan Nasional;
13	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum;
14	Kepala Pusat Data dan Informasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum;
15	Kepala Biro Umum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
16	Kepala Pusat Data dan Informasi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
17	Kepala Biro Umum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
18	Direktur Manajemen Informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi;
19	Kepala Pusat Teknologi Informasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
20	Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
21	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, Ombudsman RI;
22	Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi, Ombudsman RI;
23	Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kepegawaian, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
24	Asisten Deputi Infrastruktur Fisik, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
25	Sekretaris, Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
26	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum;
27	Kepala Pusat Data dan Informasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum;
28	Koordinator Bagian Verifikasi dan Data, Komisi Penyiaran Indonesia;
29	Koordinator Bagian Umum, Komisi Penyiaran Indonesia;
30	Sekretaris, Komisi Informasi Pusat;
31	Kepala Sekretariat, Komisi Kejaksaan;
32	Kepala Bagian Hukum, Informasi dan Komunikasi, Komisi Kepolisian Nasional;
33	Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi, Komisi Aparatur Sipil Negara;

34	Kepala Bidang Data dan Informasi, Komisi Aparatur Sipil Negara.
35	Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi, Dewan Pers;
36	Ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi, Dewan Pers;
37	Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional;
38	Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional;
39	Kepala Bidang Perencanaan dan Hukum, Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
40	Kepala Bidang Data dan Informasi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
41	Kepala Biro Umum dan Organisasi, Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
42	Kepala Biro Perencanaan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
43	Kepala Biro Perencanaan, Lembaga Ketahanan Nasional;
44	Kepala Biro Telematika, Lembaga Ketahanan Nasional;

Kepada Yth:

Jum'at, 20 Oktober 2023, Hotel RA Suites Simatupang

No.	Instansi
1	Kepala Administrasi dan Penyusunan Program, Badan Pengusahaan Bintan;
2	Kepala Pengendalian, Badan Pengusahaan Bintan;
3	Kepala Badan Pengusahaan Karimun;
4	Kepala Biro Perencanaan dan TIK, Badan Pengusahaan Sabang;
5	Kepala Biro Umum dan Kepegawaian, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
6	Sekretaris, Lembaga Sensor Film;
7	Sekretaris, Konsil Kedokteran Indonesia
8	Kepala Sub Administrasi Umum, Konsil Kedokteran Indonesia
9	Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden, Kantor Staf Presiden;
10	Kepala Bagian Umum, Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi;
11	Kepala Biro Hukum, dan Organisasi, Badan Pengusahaan Batam;
12	Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Badan Pengusahaan Batam;
13	Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
14	Kepala Biro Perencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15	Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16	Kepala Pusat Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
17	Direktur Telematika, Badan Intelijen Negara;
18	Kepala Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Negara;
19	Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum, Majelis Permusyawaratan Rakyat;
20	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat;
21	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Dewan Perwakilan Rakyat;
22	Kepala Pusat Teknologi Informasi, Dewan Perwakilan Rakyat;
23	Sekretaris Mahkamah Agung RI;
24	Kepala Biro Umum, Badan Pemeriksa Keuangan;
25	Kepala Biro Teknologi Informasi, Badan Pemeriksa Keuangan;
26	Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Kabinet;
27	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Kabinet;
28	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Mahkamah Konstitusi;
29	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Mahkamah Konstitusi;
30	Kepala Biro Umum, Komisi Yudisial;
31	Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Komisi Yudisial;
32	Kepala Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian, Dewan Perwakilan Daerah;
33	Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi, Dewan Perwakilan Daerah;
34	Direktur Teknik, Televisi Republik Indonesia;

35	Direktur Umum, Televisi Republik Indonesia;
36	Direktur Teknologi dan Media Baru, Radio Republik Indonesia Nasional;
37	Direktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Radio Republik Indonesia Nasional;
38	Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
39	Kepala Pusat Data dan Informasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
40	Kepala Biro Teknologi Informasi, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia;

Lampiran II

Nomor : B/1325/KT.03/2023

Tanggal : 09 Oktober 2023

RUNDOWN

WAKTU (WIB)	KEGIATAN
08.30 – 09.00	Registrasi Kegiatan
09.00 – 09.15	Pembukaan
09.15 – 12.00	Teori Modelling Kerangka Kerja Arsitektur SPBE
12.00 – 13.00	Istirahat, Sholat, Makan Siang
13.00 – 16.00	Praktek Modelling Kerangka Kerja Arsitektur SPBE pada aplikasi SIA SPBE

Dokumen yang perlu disiapkan:

1. Dokumen Strategis instansi masing-masing, antara lain:
 - Dokumen SOTK Instansi
 - Dokumen Proses Bisnis
 - Renstra
 - Dokumen Perencanaan Lainnya (Masterplan, Peta Rencana, ataupun sejenisnya)
2. Template Excel Arsitektur SPBE yang telah diisi sebelumnya

Ketentuan Umum:

1. Perwakilan IPPD diharapkan dapat membawa *laptop* masing-masing.
2. Perwakilan IPPD diwajibkan memasuki ruang rapat 15 menit sebelum dimulai kegiatan untuk memastikan pelaksanaan dapat berjalan tepat waktu.
3. Untuk informasi yang berkaitan dengan Kementerian PANRB, Perwakilan IPPD dapat menghubungi Tim Asdep Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE di sebagai berikut:
 - a. Iksan Ramadhan (+62 897-9664-258) untuk Koordinasi Aplikasi SIA SPBE
 - b. Desti Nuraini (+62 857-1944-3845) untuk Koordinasi Aplikasi SIA SPBE